

REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN MAJALENGKA MENJELANG PEMILU 2024

Puja Dewangga¹

Universitas Padjadjaran, Indonesia
e-mail: dewanggapuja29@gmail.com

Ratnia Solihah²

Universitas Padjadjaran, Indonesia
e-mail: ratnia@unpad.ac.id

Diterima: 2 Februari 2023

Disetujui: 8 Juni 2023

Dipublikasikan: 27 Juni 2023

Abstract

Political parties are important instruments in democracy. And political parties are also responsible for carrying out and implementing the values of democracy. Speaking of political recruitment, it will be continuous with the activities of filling political positions in the country, which are expected to be able to carry out the functions of the political system as well as possible, in order to serve and provide protection for the people/society.

The purpose of this study is to describe and analyze the recruitment process for Golkar Party DPRD Member Candidates in Majalengka Regency ahead of the 2024 Election. In the recruitment process for Golkar Majalengka DPRD Member Candidates in the previous election there was still minimal socialization of recruitment, lack of transparency and the quota for Golkar Party DPRD Member Candidates was not fulfilled in several electoral districts (Dapil) of Majalengka Regency in 2019.

The method used in this study is qualitative using a descriptive approach. In collecting data, researchers used primary data, namely by conducting interviews and using secondary data through literature or literature studies and documents. Determination of informants in this study using a purposive technique. In analyzing the data, the researcher uses analytical techniques according to Miles and Huberman, which include data collection, data reduction, data display, conclusion; drawing/verification. In validating the data, source triangulation and triangulation methods are used by checking data obtained from various sources. The concept used in this study is the recruitment concept according to Pippa Norris.

The results of the study show that in the process of recruiting candidates for the Golkar Party DPRD members in Majalengka Regency ahead of the 2024 Election which includes candidacy and selectorate, there is still a lack of socialization and lack of transparency in recruitment to the public, there is political pragmatism that leads to the necessity of every candidate have political capital or costs, the location of the selection is easily accessible to the general public in several processes and the rest is closed, as well as the process of making decisions or determinations that are carried out behind closed doors. Based on this, the researcher concludes that the recruitment process tends to be closed, because in the process it leads to a closed recruitment pattern.

**Keywords: Recruitment, Candidates for Members of the Golkar Party DPRD
Majalengka Regency**

Abstrak

Partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Dan partai politik jugalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan serta menerapkan nilai-nilai dari demokrasi. Berbicara rekrutmen politik, maka akan berkesinambungan dengan kegiatan pengisian jabatan politik di dalam negara, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi dari sistem politik dengan sebaik mungkin, dalam rangka melayani serta memberikan perlindungan bagi rakyat/masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. Dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka di Pemilu sebelumnya masih minim sosialisasi rekrutmen, kurangnya transparansi dan tidak terpenuhinya kuota Calon Anggota DPRD Partai Golkar di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.

Metode yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, yakni dengan melakukan wawancara dan menggunakan data sekunder melalui studi literatur atau kepustakaan dan dokumen. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang meliputi data *collection*, data *reduction*, data *display*, *conclusion*; *drawing/verification*. Dalam memvalidasi data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan mengecek data yang didapat melalui berbagai sumber. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rekrutmen menurut Pippa Norris.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu tahun 2024 yang meliputi kandidasi (*candidacy*) dan penyeleksi (*selectorate*) masih ditemukan minimnya sosialisasi dan kurangnya transparansi rekrutmen pada publik, adanya pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik, lokasi seleksi mudah di akses masyarakat umum dalam beberapa proses dan sisanya tertutup, serta proses pengambilan keputusan atau penetapan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses rekrutmen tersebut cenderung bersifat tertutup, karena di dalam prosesnya mengarah pada pola rekrutmen tertutup.

**Kata Kunci: Rekrutmen, Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten
Majalengka**

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Dan partai politik jugalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan serta menerapkan nilai-nilai dari demokrasi. Jika dianalogikan, demokrasi dan partai politik ini dapat digambarkan sebagai sebuah unsur-unsur persenyawaan. Ketika hidrogen dan oksigen bersatu itu

menjadi air, maka demokrasi dan partai politik akan menghasilkan kedaulatan rakyat. Keduanya merupakan pilar penting, dan tanpa partai politik, nampaknya demokrasi tidak akan dapat menghadirkan rakyat yang berdaulat. Hal itu terlihat sejalan dengan argumen atau pendapat *Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)* bahwa setidaknya ada tiga alasan perlu adanya partai politik agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan bagi perwakilan politik; Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi¹.

Menurut Sigmund Neumann², partai politik dikatakan sebagai organisasi para aktivis politik yang memiliki usaha untuk meraih sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan mengambil dukungan dari rakyat melalui proses kompetisi bersama golongan-golongan yang memiliki pandangan berlainan. Pernyataan ini secara tidak langsung menggambarkan partai politik sebagai sebuah wadah atau organisasi, yang dikaitkan dengan kekuasaan melalui sebuah usaha perebutan. Hal ini menunjukkan adanya pertarungan antar partai politik tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dibaliknya ada simpati dan dukungan rakyat yang ingin diraih. Selain itu, Carl J. Friedrich³, mengemukakan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dengan sebanding dalam tujuannya untuk mendapatkan serta mempertahankan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan yang diperuntukan pada pemimpin partainya, yang nantinya dapat menyalurkan kebermanfaatannya yang sifatnya idiil maupun materiil.

Pada masa orde baru, pemerintah di masa tersebut melakukan usaha penyederhanaan partai politik, yang menyebabkan hanya ada tiga fusi partai politik. Partai Golkar, PDIP, dan PPP adalah gambaran dari penggabungan (fusi) partai-partai pada tahun 1975⁴. Namun akhirnya demokrasi hadir setelah adanya reformasi di tahun 1998, sekaligus menandai runtuhnya masa orde baru. Dari sinilah munculnya keterkaitan yang erat antara partai politik dengan demokrasi, dimana partai politik dianggap sebagai instrumen penting dalam berfungsinya demokrasi. Itulah kenapa, partai politik dan demokrasi harus jalan beriringan. Sehingga nantinya

¹ (Netherlands Institute for Multiparty Democracy NIDM 2006: 10)

² (dalam Budiardjo 2008: 404)

³ (dalam Budiardjo 2008: 404)

⁴ Ramadhan, "Menuju Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa."

terdapat kesinambungan (*continuity*) antara partai politik dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Untuk itu, partai politik dapat dirasakan manfaatnya ketika berhasil menerapkan fungsinya dengan baik.

Berbicara soal rekrutmen politik maka ini akan menyangkut pada kualitas demokrasi dan pemimpin atau perwakilan rakyat kelak. Rekrutmen politik menjadi salah satu ruang terciptanya sebuah demokrasi di internal maupun eksternal partai politik, dan menjadi salah satu ruang bagi partai politik guna mengumpulkan anggota terbaiknya untuk berkontestasi di dalam politik elektoral (*election political*). Selain itu, partai politik ini tentunya menjalankan rekrutmennya masing-masing. Dalam rekrutmen politik terdapat proses, dan dianggap menjadi salah satu yang menentukan dijalankan atau tidaknya intruksi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Bab XI di dalam pasal 29 yang menjelaskan terkait Rekrutmen Partai Politik. Pokok inti dari kandungan UU dan pasal tersebut adalah memberi keharusan partai politik dalam penyelenggaraannya haruslah terbuka. Selain itu menurut Saputra⁵ dikatakan bahwa “*sunnguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun.*”

Hanya Golkar yang di awal pembentukan tidak menggunakan embel-embel atau diksi “Partai” pada Pemilu tahun 1971⁶. Seperti yang tertulis dalam direktur penyelenggara pemilu 2021⁷, disebutkan bahwa Pemilu pertama pada 5 Juli 1971 ini dilaksanakan secara tidak demokratis. Hal itu dibuktikan oleh adanya kebijakan dari penguasa saat itu, yakni Presiden Soeharto, yang tidak melaksanakan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966 yang mengharuskan Pemilu dilaksanakan selambat-lambatnya pada 6 Juli 1968. Dan Pemilu pertama tersebut akhirnya diputuskan oleh Presiden Soeharto pada 5 Juli 1971. Di balik penundaan tersebut, didapat fakta kepentingan politik tersembunyi dari penguasa orde baru, yang kala itu membutuhkan mesin politik guna melanggengkan kekuasaan. Dibuktikan dengan terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar, yang dikonsolidasikan ketika Pemilu pertama belum dimulai. Sekber ini mengkonsolidasikan tokoh-tokoh militer dan sipil guna menyongsong Pemilu pertama, dan berhasil membangun kompromi politik bersama penguasa kala itu. Fakta inilah yang membuat Golkar dapat mengikuti Pemilu 1971, dan tidak ingin menggunakan embel-embel partai melainkan

⁵ Saputra (2012)

⁶ Ridha, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan.”

⁷ Direktorat Penyelenggara Pemilu, “Pemilihan Umum Tahun 1971.”

golongan. Hingga pada akhirnya, Golkar dapat memperoleh suara 63,8 persen dan sekaligus menjadi pemenang Pemilu pertama yang tidak demokrasi kala itu ⁸.

Namun atas dasar tekad dan kesepakatan para pemimpinya guna membawa partai ini menjadi lebih baik, maka Golkar bertransformasi menjadi Partai Golkar. Partai Golkar ini dinilai baik dari segi rekrutmen politik, kaderisasi politik, dan seleksi, yang ditandai munculnya tokoh-tokoh ternama seperti Akbar Tanjung (mantan Ketua DPR RI 1999-2004). Pencapaian ini merupakan hasil dari metamorfosis Partai Golkar, yang diinisiasi oleh kader-kadernya kala itu, berkat itu juga, partai berlogo pohon beringin ini dapat terlepas dari ancaman dan cengkraman di awal era reformasi ⁹. Dan perubahan itu akan terus terjadi, sehingga penting untuk kita mengikuti dan meneliti lebih jauh terkait rekrutmen politik Partai Golkar. Maka dari itu, ini salah satu dasar bagi peneliti untuk tertarik dalam meneliti pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar.

Adapun alasan mengapa Partai Golkar di Kabupaten Majalengka yang dipilih. Karena peneliti menyadari, bahwa dinamika politik di Kabupaten Majalengka jarang menjadi atensi politik nasional. Maka dari itu, peneliti mencoba mengambil fenomena dari data di pembahasan sebelumnya untuk dihubungkan dengan dinamika perolehan kursi Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka. Mengutip data BPS, penurunan itu mulai terlihat setelah Pemilu 2004, dimana kala itu Partai Golkar memperoleh 11 kursi di DPRD dan berhasil memenangkan kadernya menjadi Bupati pada 2 Pilkada berturut-turut di Kabupaten Majalengka. Akan tetapi, di tahun 2009 perolehan kursi Anggota DPRD Partai Golkar mengalami penurunan yang signifikan, yakni menjadi 6 kursi saja ¹⁰. Dan data ini membuktikan, bahwa Partai Golkar Majalengka terpengaruh juga oleh dinamika perolehan jumlah kursi di tingkat Nasional. Pada akhirnya, data inilah yang menjadi alasan kuat bagi peneliti tertarik untuk meneliti Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan data terkait fenomena turunnya perolehan kursi Anggota DPRD Partai Golkar yang cukup fluktuatif, adapun data perolehan kursi di tahun berikutnya yakni Pemilu 2014 dan 2019. Mengutip dari berita Pikiran Rakyat oleh Punawati ¹¹, disebutkan bahwa terdapat sembilan partai politik yang berhasil menang dan

⁸ Direktorat Penyelenggara Pemilu.

⁹ (Prasojo 2019: 21)

¹⁰ (BPS 2018)

¹¹ Purnawati, "22 Dari 50 Caleg Terpilih DPRD Majalengka Adalah Incumbent."

mendapatkan kursi di Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Majalengka. Dan salah satunya yaitu Partai Golkar, yang juga berhasil berada pada posisi ke-3 dalam perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Majalengka. Persaingan perubatan kursi DPRD di Kabupaten Majalengka tidaklah mudah, itu diakibatkan dominasi PDIP yang acap kali tidak terbendung oleh setiap partai yang ada. Namun dalam politik tidak ada yang mustahil, banyak sekali kemungkinan yang dapat muncul, dan munculnya perubahan peta kekuatan politik itu adalah sebuah keniscayaan.

Berbicara rekrutmen politik, maka akan berkesinambungan dengan kegiatan pengisian jabatan politik di dalam negara, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi dari sistem politik dengan sebaik mungkin, dalam rangka melayani serta memberikan perlindungan bagi rakyat/masyarakat. Dalam hal ini Czudnowski dalam bukunya¹², mengungkapkan bahwa rekrutmen merupakan suatu proses bagi sebagian orang atau kelompok yang terlibat aktif dalam politik. Selain itu Subakti dalam Ilhamsyah¹³ mengatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah ajang seleksi dan pemilihan atau pengangkatan individu maupun kelompok guna menjalankan beberapa peranan dalam sistem-sistem politik secara umum dan pemerintahan secara khusus. Adapun pendapat dari buku Gaffar¹⁴, mengatakan bahwa “*rekrutmen politik adalah sebuah proses pengisian atau penambahan politik pada jabatan-jabatan negara*”.

Selanjutnya, jika melihat fenomena rekrutmen partai politik di Indonesia saat ini. Maka dapat dipastikan rekrutmen yang dilakukan oleh Parpol saat ini masih jauh dari kata demokratis dan terbuka. Pernyataan tersebut dapat terkonfirmasi penelitian dari Todapa¹⁵, didapat hasil penelitian bahwa ada ketidaksesuaian dan aturan yang dilanggar dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDI-P Kabupaten Sigi. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil rekrutmen yang dilakukan tersebut kental akan pengaruh kedekatan calon dengan elit Partai PDI-P. Data penelitian tersebut cukup menggambarkan, seperti apa kondisi atau fenomena rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Sungguh tidak mencerminkan demokrasi dan cenderung mengarah pada praktik-praktik pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik.

¹² Anshari & Fadiyah, “Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Dpr Ri Tahun 2014-2019).”

¹³ Ilhamsyah, “Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dpd Partai Solidaritas Indonesia (Psi) Kabupaten Wajo.”

¹⁴ Gaffar (1999: 155)

¹⁵ Todapa, “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.”

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Hal itu merupakan suatu keharusan bagi partai politik, dan membuat demokrasi berjalan sesuai dengan semestinya. Dalam penerapan rekrutmen, biasanya setiap partai politik memiliki perbedaan proses rekrutmen politik bagi calon Anggota DPRD. Inilah yang peneliti lihat sebagai fenomena dari penelitian yang sedang dibahas, dan subjek yang diambil adalah Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka. Partai Golongan Karya (Golkar) ini memiliki sekap terjang yang terbilang lama. Di awal terbentuknya, Partai Golkar ini menjadi salah satu partai yang pernah berkuasa dalam waktu lama di Indonesia.

Selanjutnya, dari hasil peninjauan di tempat magang tahun 2022, ditemukan juga indikasi persoalan, yakni mengenai minimnya sosialisasi politik oleh Parpol di Kabupaten Majalengka, yang berakibat pada gairah partisipasi politik masyarakat. Seperti apa yang terjadi pada Partai Golkar, dimana mereka jarang atau tidak rutin memberikan sosialisasi politik jauh sebelum Pemilu berlangsung (hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, 1 Mei 2022). Banyak sekali ketidaksiapan yang diperlihatkan masyarakat ketika berbicara atau mendiskusikan soal isu politik. Ini bukanlah kondisi yang baik, ketika masyarakat Majalengka baik dari kalangan muda hingga tua tidak melek terhadap politik. Maka tidak menutup kemungkinan, bahwa suatu saat nanti partai politik (Parpol) di Majalengka, khususnya Partai Golkar, terancam kekurangan kader berkualitas yang ingin bergabung dengan partai berlambang beringin tersebut. Dan fenomena ini sangat kontra produktif dengan persoalan yang muncul sebelumnya, yakni kosongnya 3 kuota Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Majalengka.

Ada beberapa fenomena atau persoalan yang membuat penelitian terkait rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini perlu dilakukan, salah satunya terkait transparansi dalam proses rekrutmen. Itu menjadi penting karena Norris menyebutkan dalam buku Richard S Katz & William Crotty¹⁶ setiap proses pengambilan keputusan selalu memiliki konsekuensi, dan salah satunya adalah tentang bagaimana rekrutmen yang dilakukan tersebut bekerja idealnya dalam berdemokrasi, dan yang dimaksudkan dalam demokrasi dari pernyataan tersebut, yakni dalam hal kewajaran proseduralnya, transparansi dan kesederhanaannya. Permasalahan terkait minimnya transparansi mengenai hasil penilaian rekrutmen

¹⁶ (Richard S Katz & William Crotty 2006: 86)

Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka (hasil wawancara dengan Pengurus DPD Partai Golkar Majalengka, 26 April 2022). Dan dengan minimnya transparansi tersebut, tidak menutup kemungkinan partai politik dan khususnya Partai Golkar Majalengka menuju pada proses rekrutmen yang tertutup dan tidak demokratis.

Berdasarkan peninjauan awal saat peneliti mengikuti magang di Partai Golkar Kabupaten Majalengka tahun 2022, didapat data melalui wawancara/diskusi. Telah diperoleh data di Dapil 4 Majalengka (meliputi Cigasong, Sukahaji, Sindang, Argapura, Maja, Banjaran, dan Talaga), tercatat hanya ada tujuh Calon Anggota DPRD Partai Golkar dari 10 kuota yang tersedia pada 2019 lalu. Dan pihak DPD Partai Golkar mengklarifikasi bahwa, fenomena tersebut muncul diakibatkan oleh kegagalan dari Calon Anggota DPRD dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan hasil verifikasi citra calon tersebut di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya (hasil wawancara dengan Ketua Partai Golkar Majalengka, 28 April 2022).

Beberapa penelitian yang membahas proses rekrutmen Calon Anggota DPRD, antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan Purnawati¹⁷ yang meneliti tentang Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini berfokus pada mekanisme atau proses rekrutmen anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan didapat hasil penelitian bahwa dalam prosesnya, terdapat dua sistem dalam rekrutmen anggota legislatif DPC PDI Perjuangan, yakni sistem terbuka dan tertutup. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Yohana¹⁸ tentang Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai Demokrat di Dewan Pimpinan Cabang Kota Pontianak. Penelitian ini mempunyai fokus tujuan dalam meneliti serta mendeskripsikan proses rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat di Kota Pontianak. Adapun hasil penelitiannya adalah, DPC Partai Demokrat menggunakan rekrutmen terbuka, yang dibagi kedalam beberapa proses, yaitu; (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumuman perihal pendaftaran, (3) tahap seleksi khusus, (4) tahap penugasan, (5) tahap evaluasi, dan (6) Tahap penetapan.

Selain itu, didapat juga beberapa penelitian terdahulu lainnya seperti dari Ilhamsyah¹⁹, Junaidi dan Marwan²⁰, Saputra²¹, dan Prasojo²² yang berkaitan dengan

¹⁷ Purnawati (2021)

¹⁸ Yohana, "Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai."

¹⁹ Ilhamsyah (2019)

rekrutmen terhadap calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Penelitian tersebut membahas mengenai proses rekrutmen, yang secara tidak langsung merupakan bagian dari dinamika rekrutmen partai politik itu sendiri. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Suhendra²³ yang fokus penekanannya kepada kriteria dalam berjalannya proses rekrutmen di partai politik tersebut. Dari beberapa penelitian tentang rekrutmen politik yang telah dilakukan tersebut, menjadi rujukan bagi penulis dalam memunculkan focus dan lokus penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. Dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka di Pemilu sebelumnya masih minim sosialisasi rekrutmen, kurangnya transparansi dan tidak terpenuhinya kuota Calon Anggota DPRD Partai Golkar di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.

Sehingga menarik untuk diteliti tentang bagaimana strategi Partai Golkar Majalengka dalam proses rekrutmennya, guna mengantisipasi hal serupa agar tidak terulang kembali. Maka dari persoalan tersebut, penelitian kali ini ingin meneliti terkait dengan rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Majalengka. Terkhusus dalam proses yang dilakukan guna menghasilkan Calon Anggota DPRD yang berkualitas dalam Pemilu di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, yakni dengan melakukan wawancara dan menggunakan data sekunder melalui studi literatur atau kepustakaan dan dokumen baik dari media elektronik maupun cetak. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang meliputi data *reduction*, data *display*,

²⁰ Junaidi dan Marwan (2019)

²¹ Saputra (2012)

²² Prasojo (2019)

²³ Suhendra (2009)

conclusion, drawing/verification. Dalam memvalidasi data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan mengecek data yang didapat melalui berbagai sumber. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rekrutmen menurut Pippa Norris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. Dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka di Pemilu sebelumnya masih minim sosialisasi rekrutmen, kurangnya transparansi dan tidak terpenuhinya kuota Calon Anggota DPRD Partai Golkar di beberapa daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Majalengka di tahun 2019.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen politik di internal partai politik akan senantiasa mempunyai proses didalamnya. Dari proses rekrutmen inilah, seluruh partai politik dapat melahirkan calon-calon terbaiknya guna mengisi jabatan atau posisi politik dalam pemerintahan. Salah satunya rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, yakni dalam rangka mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2024 mendatang. Dan berjalannya rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan Partai Golkar ini, menjadi sinyal bahwa pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut akan segera datang.

Sesuai dengan yang dijelaskan di bab sebelumnya, ada beberapa proses yang akan dijabarkan oleh peneliti. Proses rekrutmen tersebut meliputi kandidasi (*candidacy*), penyeleksi (*selectorate*), lokasi seleksi kandidat, dan keputusan atau penetapan. Dan peneliti telah mendapatkan data terkait dengan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024, yang tentunya dihasilkan dari wawancara di lapangan yang peneliti lakukan selama kurang lebih 3 bulan di DPD Partai Golkar Majalengka, dan berikut hasil penelitian tersebut.

Kedua, mengenai proses seleksi yang berhubungan dengan penyeleksi itu sendiri. Tim penyeleksi (*selectorate*) di Partai Golkar Majalengka ini biasa disebut sebagai tim penjangaran, dan tercantum secara *ad hoc* dan *ex-officio* dalam peraturan organisasi atau AD/ART. Dalam hal ini, Partai Golkar Majalengka memilih tim penyeleksi dari struktural atau pengurus partai untuk melaksanakan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar. Selain itu, terkait tugas pokok dari tim

penyeleksi (*selectorate*) adalah mempersiapkan dan mengimplementasikan persyaratan yang mengacu pada peraturan atau hukum-hukum yang ada, termasuk menyeleksi syarat yang telah dikumpulkan oleh para kandidat calon²⁴.

Selanjutnya, lokasi penyeleksian yang akan erat kaitannya juga dengan pengambilan keputusan atau penetapan calon dalam sebuah rekrutmen. Hal ini akan menentukan tentang seberapa mudah lokasi seleksi kandidat tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum atau calon pendaftar. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty²⁵, bahwa penentuan lokasi ini akan berkaitan dengan pengambilan keputusan dan proses kandidasi atau pencalonan dalam suatu partai. Dan dalam menentukan lokasi rekrutmen, partai akan memandang bahwa lokasi tersebut harus tersentralisasi di kantor partai itu sendiri, seperti halnya dilakukan di DPD Partai Golkar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa partai akan melakukan penetrasi atau melakukan desentralisasi terhadap keanggotaan akar rumputnya, dan itu bisa dilakukan di tingkat pengurus pimpinan kecamatan/desa. Maka dari itu, Partai Golkar Majalengka memilih kantor DPD menjadi lokasi dilakukannya rekrutmen Calon Anggota DPRD.

Dan berikutnya yakni proses keputusan atau penetapan, dan merupakan proses yang terbilang cukup krusial serta penuh dinamika praktis yang penuh akan konsekuensi. Sejalan dengan yang disebutkan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty²⁶ setiap proses pengambilan keputusan selalu memiliki konsekuensi, dan salah satunya adalah tentang bagaimana rekrutmen yang dilakukan tersebut bekerja idealnya dalam berdemokrasi. Yang dimaksudkan dalam demokrasi dari pernyataan tersebut, yakni dalam hal kewajaran proseduralnya, transparansi dan kesederhanaannya. Maka dari itu, Partai Golkar Majalengka perlu mengimplementasikan keputusan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar secara demokratis dan terbuka di internalnya.

Kandidasi (*Candidacy*)

Menyangkut proses kandidasi (*candidacy*), ini akan berkaitan dengan siapa saja yang bisa dikandidasikan, meliputi aturan-aturan, kriteria dan syarat yang akan dipakai oleh partai. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Norris dalam buku Richard S Katz &

²⁴ (Norris 2006: 105)

²⁵ (Richard S Katz & William Crotty 2006: 93)

²⁶ (Richard S Katz & William Crotty 2006: 89)

William Crotty²⁷, menyebutkan bahwa proses rekrutmen itu sendiri berkaitan dengan sertifikasi, yang perlu melibatkan pemilihan hukum (seperti Undang-Undang Pemilu), peraturan partai, dan kriteria yang dimiliki partai tersebut guna memenuhi syarat menjadi kandidat. Sehingga, proses kandidasi ini biasa juga disebut sebagai proses sertifikasi, oleh karenanya dapat difenisikan sebagai sebuah usaha dari siapa saja untuk memenuhi syarat menjadi seorang kandidat untuk meraih posisi atau jabatan yang ada²⁸.

Partai Golkar sebagai salah satu Parpol dengan perolehan kursi terbanyak ketiga di Kabupaten Majalengka, pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 ini telah melaksanakan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD di internal partainya. Setiap partai politik biasanya mempunyai proses rekrutmen yang berbeda-beda, oleh karenanya Partai Golkar Majalengka akan mempunyai proses dan budaya atau ciri khasnya tersendiri dalam proses rekrutmennya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, yakni bahwa:

“Budaya atau ciri khas Partai Golkar Majalengka dalam menjalankan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD ini mengedepankan asas keluarga kekarwaan, dengan artian memberikikan kesempatan pada kader di lingkup organisasi yang terafiliasi dengan Partai Golkar, baik organisasi yang didirikan seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), dan ormas sayap lainnya, maupun organisasi yang mendirikan seperti Kosgoro 1957, Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Baru setelahnya beranjak keluar pada organisasi-organisasi yang masih berkaitan dengan Partai Golkar Majalengka, seperti Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan dalam menjalin komunikasinya Partai Golkar Majalengka menggunakan pendekatan politik yang tertutup” (Kamis, 15 Desember 2022, Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Eka Mulyana)

Pernyataan itu dapat dijadikan sebagai sebuah konfirmasi atau pertanda, bahwa dalam praktiknya, rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini mengutamakan kadernya. Peneliti pun melakukan obeservasi untuk memastikan hasil wawancara tersebut, dan didapat fakta bahwa memang benar adanya, bahwa calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Majalengka didominasi oleh kader sayap partai. Kader-kader yang ikut mendaftar hingga menjadi Calon Anggota DPRD Partai Golkar itu tersebar dalam beberapa sayap partai atau organisasi kepemudaan (OKP), yakni berasal dari AMPG, AMPI, KPPG, Kosgoro, HWK, dan SOKSI. Dengan kata lain, setiap sayap

²⁷ (Richard S Katz & William Crotty 2006: 89)

²⁸ (Norris 2006: 90)

partai atau organisasi kepemudaan (OKP) itu memiliki perwakilan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Menyangkut hal tersebut, Partai Golkar Majalengka dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD ini mempunyai beberapa kriteria khusus atau ideal dalam partainya. Kriteria tersebut masih berkesinambungan dengan pernyataan dari hasil wawancara sebelumnya, yakni mengedepankan kader atau struktur Partai Golkar untuk dikandidasikan sebagai calon. Seperti yang disampaikan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:

“Kriteria ideal Partai Golkar, dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai Calon Anggota DPRD, lalu dia populer juga, dan bisa membiayai mobilitas dia maupun tim sukses ketika kampanye (modal ekonomi atau finansial). Cuma itu adalah kriteria-kriteria yang memang tidak bisa kami ukur secara akurat, karena kita hanya bisa melihat dari persyaratan administrasi yang sudah diajukan, kemudian kita sedikit melakukan komunikasi dengan lingkungannya, terkait seperti apa dia dilingkungannya dan lain-lain. Lalu, tentunya yang mengenai kriteria dari Partai Golkar ini mengangkat struktur dulu, yang mana merupakan orang-orang yang sudah lebih dari sepuluh tahun berada di Partai Golkar. Bisa berada di posisi wakil ketua dan menjadi tim penjaringan atau penyeleksi Calon Anggota DPRD. Dan ini otomatis membentuk sebuah loyalitas terhadap partai dan juga membentuk sebuah loyalitas terhadap idealisme semua aturan. Sehingga, setiap calon dari Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang kuat, agar menjadi Calon Anggota DPRD yang ideal.”

Hal itu sejalan dengan dengan yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty²⁹, bahwa dalam proses kandidasi ini memang seringkali partai politik mencampurkan aspek normatif atau norma umum yang sifatnya formal dan norma sosial atau budaya yang sifatnya informal, sama halnya seperti apa yang terjadi dalam proses kandidasi Partai Golkar Majalengka. Dan berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat aspek subjektivitas dalam menentukan kriteria atau dapat disebut bersifat informal. Namun yang perlu digaris bawahi dalam penentuan kriteria pada proses kandidasi ini, Partai Golkar Majalengka pada dasarnya mengutamakan kader atau pengurusnya yang sudah lama bergabung dan sudah teruji loyalitasnya.

Memang secara internal, partai terbuka pada pengurus hingga kader-kadernya terkait rekrutmen tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan pembuktian atau implementasi di lapangan. Itu semua dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Wartawan Radar Cirebon Bapak Kiki yang sering dihubungi oleh Partai Golkar,

²⁹ (Richard S Katz & William Crotty 2006: 90)

menyebutkan bahwa:

“Perihal apakah ada pemberitaan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar, sampai dengan saat ini saya belum pernah diminta untuk membuat pemberitaan tersebut. Tapi kalau soal target kursi untuk Pemilu 2024 yang akan datang itu selalu disampaikan atau diminta untuk diberitakan. Dari yang pernah saya dengar, mereka (Partai Golkar) itu hanya membuat spanduk atau *banner* untuk memberitahu masyarakat bahwa ada rekrutmen di Golkar.”

Tidak berhenti sampai disitu, ketika peneliti melakukan pendalaman informasi mengenai alasan tidak adanya pemberitaan terkait rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan Partai Golkar Majalengka, diungkapkan juga oleh Wartawan Radar Cirebon Bapak Kiki, bahwa:

“Dari apa yang pernah kemarin saya dengar, kemungkinan alasan dari Partai Golkar tidak memberitakan soal rekrutmen Calon Anggota DPRD ini, karena untuk calon yang ingin mendaftar tahun ini itu sudah penuh dan sudah tersusun. Sehingga pada waktu itu pihak partai bilang, karena memang sudah ada orang-orang yang masuk, jadi udah tidak harus membuka pemberitaan rekrutmen dan lebih fokus ke masalah menambah perolehan jumlah kursi.”

Jika dilihat dari beberapa pernyataan yang memuat informasi dari narasumber, nampaknya banyak hal-hal penting dalam memberikan jawaban serta gambaran terkait dengan proses kandidasi pada rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait proses kadidasi (*candidacy*) tersebut. Pertama, dimulai dari landasan hukum yang digunakan, yakni mengacu pada AD/ART atau peraturan organisasi dan peraturan KPU. Dan dari ketiga landasan tersebut Partai Golkar bisa menentukan kriteria dan persyaratan dalam rekrutmen yang akan dilakukan. Kedua, jika mengacu pada kriteria yang disampaikan melalui hasil wawancara di atas, tentu dapat terlihat bahwa Partai Golkar mempunyai kriteria yang sifatnya subjektif dan lebih mengedepankan kader lamanya untuk dikandidasikan sebagai calon. Ketiga, berbeda dengan kriteria, persyaratan lebih bisa diterima secara objektif, dikarenakan mengacu pada hal-hal yang sifatnya administratif dan mengacu pada ketentuan peraturan di awal, baik peraturan organisasi (AD/ART) maupun peraturan KPU. Dan terakhir, perihal sosialisasi dalam proses awal rekrutmen ini, Partai Golkar Majalengka terbilang minim dalam memberitakan rekrutmen Calon Anggota DPRD ini pada masyarakat umum di media, baik melalui media massa ataupun media sosial. Itu semua terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan salah satu Wartawan Radar Cirebon.

Sehingga, dalam proses kandidasi (*candidacy*) Calon Anggota DPRD Partai

Golkar Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024 ini, peneliti menyimpulkan dalam prosesnya masih kurang terbuka atau kurang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam rekrutmen, dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai rekrutmen dan subjektifnya kriteria yang diinginkan oleh partai pada Calon Anggota DPRD yang ingin mendaftar, walaupun memang kesempatan bagi orang baru yang ingin mencalonkan melalui Partai Golkar Majalengka masih ada dan tidak tertutup secara total. Namun, dengan minimnya sosialisasi rekrutmen pada publik, ini menunjukkan bahwa Partai Golkar Majalengka lebih mengutamakan kader di internal partainya sendiri.

Penyeleksi (*Selectorate*)

Setelah mengupas beberapa hal yang menyangkut perihal penyeleksi dalam rekrutmen, dari mulai susunan tim penyeleksi, kualifikasi tim penyeleksi, dan tugas pokok tim penyeleksi dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Kali ini peneliti coba mempertegas beberapa data sebelumnya terkait tim penyeleksi (*selectorate*), yakni dengan menjabarkan data tentang implementasi dari tugas pokok yang dimiliki oleh tim penyeleksi atau penjaringan Partai Golkar Majalengka. Dan dari data ini, akan didapat sebuah gambaran praktis dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim penyeleksi atau penjaringan rekrutmen Partai Golkar Majalengka. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan sebuah tantangan yang dihadapi oleh tim penyeleksi Partai Golkar Majalengka dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan tindakan-tindakan praktis dalam rekrutmen, itu semua disampaikan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:

“Namun tantangannya dalam mengimplementasikan kriteria ideal ini (mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik) adalah biasanya bersumber dari orang-orang yang dulunya mempunyai *power* atau kekuatan untuk mempengaruhi kriteria, dan pada akhirnya kadang-kadang kita keluar dari nilai-nilai ideal tersebut. Tapi kami berkomitmen untuk orang-orang baru masuk partai, kami sebagai partai politik juga tidak boleh menutup mata dengan orang-orang yang dia bisa menunjukkan kemampuannya serta kreatifitasnya, dan otomatis dia akan menemukan sebuah koneksi yang akan menguntungnya sebagai personal serta mendapat kepercayaan dari partai.

Dari pernyataan di atas, terdapat sebuah informasi yang secara tidak langsung mengonfirmasi, bahwa tim penyeleksi mengalami kesulitan dalam menjaga kriteria ideal atau yang seharusnya jauh dari praktik-praktik pragmatism politik. Dalam prosesnya,

pragmatisme politik mempunyai orientasi pada praktik mencari jalan pintas dan secara tidak langsung mengubah realita yang tidak seharusnya terjadi menjadi nyata. Dan gejala pragmatism politik itu sendiri dapat didukung oleh pernyataan dari ³⁰, bahwa pragmatism politik menjadikan politik lebih instan, dan didalam praktiknya terbilang tanpa pembekalan serta hanya terasa dalam jangka pendek saja. Dan ketika tim penyeleksi Partai Golkar dalam rekrutmen tersebut tidak dapat menjaga nilai-nilai idealnya, maka disitulah terjadi pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik.

Dalam pembahasan mengenai penyeleksi (*selectorate*) yang dibentuk oleh Partai Golkar Majalengka dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, peneliti menemukan adanya kondisi yang mengharuskan tim penyeleksi atau penjangkaran rekrutmen Calon Anggota DPRD ini menormalisasi praktik pragmatisme politik dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, tim penyeleksi atau penjangkaran yang dibentuk Partai Golkar Majalengka tersebut sangat rawan untuk dibenturkan dengan praktik-praktik pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik ketika menjalankan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Namun dalam hal ini, pragmatisme politik yang terjadi akan membuka ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk menentukan arah tujuan politiknya berdasarkan kepentingan, baik itu kepentingan kekuasaan (*power*), manfaat (*utility*), ataupun kemenangan (*glory*) semata ³¹. Sehingga, peneliti menganalisis bahwa, Partai Golkar Majalengka sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dalam perekrutan, lalu melakukan praktik pragmatisme politik ini adalah semata-mata untuk kepentingan partai. Seperti halnya mengutamakan kader-kader di internal partainya, mempertahankan calon petahana (*incumbent*) dan memberi kesempatan bagi orang yang mempunyai kekuatan dari segi modal ekonomi atau finansial untuk dijadikan Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Namun, bagi partai lama seperti Golkar, praktik pragmatisme politik ini menjadi alasan rasional bagi mereka dalam mengalokasikan kepentingannya demi mendapatkan kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Lokasi Seleksi Kandidat

³⁰ Ekowati (2019: 22)

³¹ (Ekowati 2019: 22)

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Norris dalam buku Richard S Katz & William Crotty³² bahwa mengidentifikasi lokasi ini menjadi penting karena akan berkorelasi dengan ruang lingkup pengambilan keputusan oleh lembaga partai, dan dalam hal itu juga akan terlihat apakah demokrasi yang mapan itu hadir bertahap mendesentralisasi proses pencalonan, dengan mengaliskan kekuasaan partai di tingkat lokal terhadap keanggotaan akar rumput. Dalam hal ini Partai Golkar pada rekrutmen Calon Anggota DPRD kemarin telah menentukan lokasi seleksi kandidat, dan akan terlihat apakah demokrasi melalui desentralisasi kekuasaan terhadap akar rumput (*grass root*) itu nampak atau tidak. Dalam pembahasan ini, peneliti berhasil mendapatkan data melalui hasil wawancara pada informan di lapangan.

Mengenai kemudahan akses atau aksesibilitas lokasi seleksi kandidat, Partai Golkar Majalengka memilih untuk melakukannya di Kantor DPD Kabupaten. Dengan kata lain, lokasi ini akan terpusat atau tersentralisasi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, yang posisinya memang berada di pusat kabupaten. Pernyataan itu terkonfirmasi oleh Ketua Tim Penjaringan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, menyebutkan bahwa:

“Kalau untuk rekrutmen kita pusatkan semua di DPD. Namun untuk penetrasi ke lapangan kita gunakan penguatan per-Dapil dan kecamatan. Artinya pimpinan kecamatan itu ditugasi untuk melakukan komunikasi tertutup dengan para fungsionaris dengan Calon Anggota DPRD yang akan maju dikontestasi politik.”

Tidak hanya satu jawaban saja, melainkan ada jawaban lain yang mengkonfirmasi terkait lokasi seleksi kandidat dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Informasi kali ini disampaikan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang ingin mendaftar rekrutmen Calon Anggota DPRD, jika sulit atau terlalu jauh mengakses kantor DPD, bisa menghubungi pimpinan kecamatan atau desa dan diantarkan ke DPD. Atau sebaliknya, DPD yang akan menjemput formulir dan syarat-syarat administrasinya. Dan itu sudah menjawab terkait pertanyaan apakah lokasi rekrutmen mudah diakses atau tidak oleh masyarakat.”

Data di atas tersebut bersumber dari hasil wawancara yang peneliti lakukan guna mengetahui lokasi seleksi rekrutmen Calon Anggota DPRD, dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya pada pihak Partai Golkar Kabupaten Majalengka. Dari hasil wawancara tersebut berhasil menjawab terkait lokasi seleksi kandidat yang dipilih oleh Partai Golkar, dengan menyebutkan bahwa Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten

³² (Richard S Katz & William Crotty 2006: 86)

Majalengka sebagai lokasi seleksi kandidat.

Selanjutnya mengenai inklusivitas dan eksklusivitas lokasi seleksi kandidat yang ditentukan oleh Partai Golkar Majalengka. Apakah lokasi yang ditentukan tersebut bersifat inklusif (terbuka bagi umum), ataukah justru eksklusif (tertutup bagi umum). Pembahasan ini akan dihadapkan pada sebuah kondisi, di mana partai perlu membedakan lokasi keputusan tentang pencalonan kandidat, apakah akan dilakukan secara terpusat oleh pimpinan partai atau secara alternatif dilimpahkan pada akar rumput (*grass root*) di setiap tingkatan³³.

Mengenai pernyataan sebelumnya, apakah akan dilimpahkan secara terpusat pada pimpinan partai ataukah pada akar rumput. Peneliti dalam hal ini telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara, yang mengarah pada lokasi yang memang diatur secara tertutup. Itu dibuktikan oleh pernyataan Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka, yakni bahwa:

“Terkait inklusivitas ataukah eksklusif, jelas kita ini merekrut konstituen, maka partai ini berbasis inklusif atau dengan kata lain dapat diakses oleh siapapun atau masyarakat umum tanpa membeda-bedakan dan dalam kondisi apapun. Jelas kita bisa diakses seluas itu. Hanya saja, ada beberapa hal dalam prosesnya ini yang tidak bisa mengajak masyarakat umum, seperti misalnya rapat pleno dan penentuan nomor, ini tentunya eksklusif, karena ini memang orang-orang yang sudah paham bagaimana Partai Golkar bekerja. Kalau pendaftaran sendiri jelas kita secara terbuka memberikan kesempatan pada siapapun dalam keadaan apapun, yang terpenting dia memenuhi kriteria dan syarat-syarat.”

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa ada sebuah ‘keragu-raguan’ yang dihadapi oleh Partai Golkar Majalengka. Di satu sisi Partai Golkar Majalengka menjadikan lokasi seleksi kandidat ini inklusif atau terbuka bagi umum untuk mengakses pendaftaran, tetapi di sisi lain lokasi yang ditentukan Partai Golkar juga dapat menjadi eksklusif atau tertutup bagi umum dalam mengambil keputusan kandidat yang akan menjadi Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Majalengka. Fenomena tersebut secara langsung mengkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh³⁴, bahwa partai akan dihadapkan pada kondisi apakah pimpinan partai yang harus menentukan, ataukah dilimpahkan pada akar rumput.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi seleksi kandidat dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini cukup mudah untuk diakses. Namun, di samping mudahnya akses tersebut, lokasi seleksi kandidat dari Partai

³³ (Norris 2006: 93)

³⁴ Norris (2006: 93)

Golkar Majalengka ini tidak terbuka sepenuhnya, karena masih ada beberapa proses di lokasi seleksi kandidat tersebut yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, peneliti memberikan analisis bahwa lokasi seleksi kandidat yang ditentukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka ini bersifat tertutup, dikarenakan masih dipengaruhi oleh proses-proses yang hanya dapat diakses kader di internal partainya saja.

Keputusan atau Penetapan

Berikutnya, mengenai dinamika yang meliputi hal-hal praktis yang ada dalam proses keputusan atau penetapan kandidat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika praktis dalam sebuah proses rekrutmen ini sangat mungkin terjadi, tidak terkecuali di internal Partai Golkar Majalengka. Dan peneliti telah berhasil mengumpulkan beberapa informasi yang dihasilkan dari wawancara, yang hasilnya memang menunjukkan bahwa dinamika praktis itu benar adanya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Indra Dwi Budi Rahadian, yakni bahwa:

“Jelas, dinamika dilapangan, adanya orang yang mempunyai *power* dan punya kedekatan dengan ketua, lalu tiba-tiba dia ingin masuk menjadi Calon Anggota DPRD. Otomatis ada komunikasi tertutup yang dibangun antara orang yang punya kekuatan tersebut dengan pengurus DPD Golkar yang mempunyai pengaruh besar di internal partai. Dan biasanya, ini akan secara tidak langsung berpengaruh pada peluang kader yang sudah lama dan berpotensi menambah kursi. Kadang-kadang, itu juga terjadi pada calon incumbent, dan itu membuktikan bahwa kompromi politik itu ada dalam rekrutmen dan bisa menimpa pada siapapun.”

Ini menjadi salah satu pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka, terdapat suatu dinamika praktis yang mengacu pada alokasi kekuasaan dan kepentingan yang bersumber dari kandidat yang akan mengikuti rekrutmen tersebut. Di samping itu, pernyataan dari Bapak Indra ini sekaligus menggugurkan keterangan dari Bapak Suparman sebagai calon petahana dihalaman sebelumnya yang menyebut bahwa tidak ada perbedaan perlakuan atau kesempatan antara calon baru dan calon petahan atau *incumbent* dalam rekrutmen Partai Golkar Majalengka. Dan adapun pernyataan lain yang dapat menguatkan informasi bahwa terdapat dinamika praktis yang mengarah pada alokasi kepentingan dan pragmatisme politik. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Memen Nuryaman, menyebutkan bahwa:

“Berkaitan dengan hal-hal diluar normatif atau hal praktis, itu biasanya juga ada, seperti intervensi-intervensi dari luar atau menitipkan seseorang. Tapi kita

berbicara persoalan administrasi, jadi kita tidak bermain di wilayah praktisnya, melainkan di wilayah administrasi. Dimana saya kemarin mengatakan ke semua tim penyeleksi atau penjaringan, untuk tidak menjadikan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar ini sebagai sebuah ajang ‘bancakan’ atau mengambil keuntungan dari momen rekrutmen partai tersebut. Sehingga, pada saat rekrutmen kemarin itu bisa berjalan dengan normal-normal saja sesuai dengan ketentuan.”

Dari pernyataan di atas ini semakin dapat mengkonfirmasi, bahwa kuatnya intervensi dari luar tim penjaringan itu sangatlah nyata dalam Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka beberapa waktu yang lalu. Namun sejalan hal tersebut, tersirat dari pernyataan di atas, bahwa masih ada usaha tim penjaringan untuk tidak terbuai dengan intervensi tersebut, dan itu terlihat dari ungkapan bahwa jangan sampai rekrutmen tersebut dijadikan ajang ‘bancakan’ tau mengambil keuntungan pribadi.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, ditemukan hasil informasi bahwa dalam proses keputusan atau penetapan rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka dilakukan secara tertutup. Itu semua dibuktikan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penjaringan Partai Golkar Kabupaten Majalengka Bapak Asep Eka Mulyana, menyebutkan bahwa:

“Terkait proses penetapan itu dilakukan secara tertutup, karena hanya diperuntukkan bagi tim penyeleksi atau penjaringan saja. Tentu didalamnya cukup banyak dinamika praktis yang dapat terjadi, dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada keputusan yang akan diuat. Dan memang terkait proses menuju penetapan ini, ada arahan dari pusat ke kita itu dibuatkan daftar fungsionaris per-Dapil itu 200 persen dari jumlah Calon Anggota DPRD. Namun, didalamnya itu memang sudah dijarah orang-orang yang besar kemungkinan maju dipencalonan.

Kondisi tersebut juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Calon Anggota DPRD Baru Partai Golkar Majalengka Bapak Endin Saepudin, yakni bahwa:

“Memang ada beberapa tahapan atau proses yang masyarakat umum tidak bisa akses. Jadi terbuka untuk kami sebagai pengurus dan peserta rekrutmen Calon Anggota DPRD, akan tetapi tertutup bagi masyarakat umum, seperti halnya dalam proses rapat pleno.

Dari pernyataan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan konfirmasi tambahan, bahwa ada beberapa orang atau kandidat yang memang sudah dijarah dan dipastikan akan menjadi Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar, walaupun proses seleksi tersebut baru dimulai. Dan pernyataan tersebut seolah mengkonfirmasi pernyataan dari Wartawan Radar Cirebon, yang menyebutkan bahwa alasan Partai Golkar tidak melakukan sosialisasi rekrutmen melalui media massa, itu dikarenakan sudah terpenuhinya kandidat atau orang-orang yang akan menjadi Calon Anggota DPRD

menjelang 2024 mendatang, dan kemungkinan besar mereka itulah yang berasal dari kader atau pengurus lama Partai Golkar itu sendiri.

Sehingga, peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan tentang proses pengambilan keputusan atau penetapan dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka. Pertama, dalam proses pengambilan keputusan atau penetapan ini, Partai Golkar Majalengka melalui tim penjangkaran atau penyeleksi, dalam praktiknya masih memegang aspek demokrasi dengan memberikan kesempatan pada semua peserta rapat pleno untuk dapat memenuhi haknya, baik itu mengutarakan pendapat dan melakukan sanggahan. Kedua, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Partai Golkar Majalengka mengalami dinamika praktis seperti intervensi-intervensi politik hingga pragmatisme politik yang mengarah pada kepentingan internal partai, yang bersumber dari luar tim penjangkaran. Ketiga, dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan atau penetapan Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini dilakukan secara tertutup.

Oleh karena itu, melihat dari rincian data temuan yang dibahas sebelumnya di atas, yakni terkait proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. Dari proses rekrutmen yang meliputi kandidasi (*candidacy*), penyeleksi (*selectorate*), lokasi seleksi dan keputusan atau penetapan, peneliti menyimpulkan bahwa pola rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini sifatnya tertutup. Hal itu sejalan dengan yang disebutkan oleh Rush dan Althoff dalam jurnal³⁵ bahwa terdapat pola rekrutmen partai politik yang dibagi kedalam dua sifat yakni; Pertama, pola tertutup merupakan sistem rekrutmen secara administratif yang dilandasi atau bertumpu pada dukungan atau hak istimewa (*patronase*); Kedua, pola terbuka merupakan sistem yang didasari pada suatu ujian-ujian yang mengedepankan keterbukaan dalam rekrutmen politik partai. Dan dari data primer maupun sekunder yang dikaitkan dengan konsep Rush dan Althoff tersebutlah yang dijadikan dasar atau landasan bagi peneliti dalam memberikan kesimpulan, bahwa proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka bersifat tertutup.

C. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024, telah selesai dilaksanakan. Ada

³⁵ (Mussolli 2016: 15)

beberapa proses hingga aspek-aspek yang peneliti kaji atau teliti, dan peneliti meyakini bahwa setiap proses rekrutmen akan selalu berhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Dimulai dari proses kandidasi (*Candidacy*), pada tahap kandidasi ini peneliti dapat melihat aspek sertifikasi rekrutmen, yang meliputi landasan hukum, kriteria Calon Anggota DPRD dan persyaratan Calon Anggota DPRD, secara keseluruhan di Partai Golkar Majalengka. Proses kedua, yakni penyeleksi (*Selectorate*), dalam proses ini, akan didapat beberapa aspek rekrutmen yang meliputi, susunan tim penyeleksi Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, kualifikasi tim penyeleksi, tugas pokok tim penyeleksi, dan implementasi tugas pokok tim penyeleksi Calon Anggota DPRD Majalengka.

Ketiga, dimana lokasi seleksi kandidat tersebut akan diseleksi. Aspek tersebut akan mengkaji, aksesibilitas dari calon Calon Anggota DPRD yang akan mendaftar, dan inklusivitas (bisa didatangi masyarakat umum) atau eksklusivitas (tidak bisa didatangi masyarakat umum) lokasi rekrutmen Calon Anggota DPRD, yang secara keseluruhan ditetapkan oleh Partai Golkar Majalengka. Keempat, bagaimana kandidat tersebut diputuskan. Proses ini akan berkaitan dengan kajian terkait aspek demokrasi dalam pengambilan keputusan, dinamika keputusan/penetapan, dan terbuka atau tertutupnya proses keputusan dalam proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses kandidasi (*candidacy*) Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024 ini, peneliti menyimpulkan dalam prosesnya masih kurang terbuka atau kurang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam rekrutmen, dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai rekrutmen dan subjektifnya kriteria yang diinginkan oleh partai pada Calon Anggota DPRD yang ingin mendaftar. Sehingga berpengaruh pada ketiadaan transparansi dalam hal sistem penilaian, dikarenakan bias terhadap subjektivitas. Walaupun memang kesempatan bagi orang baru yang ingin mencalonkan melalui Partai Golkar Majalengka masih ada dan tidak tertutup secara total, namun tetap saja harus memenuhi kriteria yang berorientasi pada kepentingan partai, salah satunya kuat dalam modal ekonomi atau finansialnya.
2. Penyeleksi (*selectorate*) yang dibentuk oleh Partai Golkar Majalengka dalam prosesnya dapat disimpulkan, bahwa terdapat kondisi yang mengharuskan tim

penyeleksi atau penjaringan rekrutmen Calon Anggota DPRD ini menormalisasi praktik pragmatisme politik yang mengarah pada keharusan setiap calon mempunyai modal atau biaya politik. Dengan kata lain, tim penyeleksi atau penjaringan yang dibentuk Partai Golkar Majalengka tersebut sangat rawan untuk dibenturkan dengan praktik-praktik pragmatisme politik dalam usaha mengakomodir kepentingan partai ketika menjalankan proses rekrutmen Calon Anggota DPRD menjelang Pemilu 2024 mendatang. Dan praktik tersebut menjauhkan Partai Golkar Majalengka dalam mengedepankan aspek demokrasi dan keterbukaan politik.

3. Lokasi seleksi kandidat dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Majalengka ini cukup mudah untuk diakses. Namun, di samping mudahnya akses tersebut, lokasi seleksi kandidat dari Partai Golkar Majalengka ini tidak terbuka sepenuhnya, karena masih ada beberapa proses di lokasi seleksi kandidat tersebut yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, peneliti memberikan analisis bahwa lokasi seleksi kandidat yang ditentukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka ini bersifat aksestabilitas atau mudah diakses, kendati tidak semua proses rekrutmen yang dilaksanakan di lokasi seleksi tersebut dapat diakses atau diikuti oleh publik/masyarakat umum.
4. Proses pengambilan keputusan atau penetapan dalam rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Majalengka. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam proses keputusan atau penetapan Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka dilakukan secara tertutup. Sehingga narasi-narasi yang diutarakan oleh tim penyeleksi bahwa dalam proses keputusan ini semua pihak yang hadir dalam rapat pleno diberikan hak bersuara atau berpendapat yang sama, tapi semua itu secara otomatis teranulir dengan fakta implementasi di lapangan, dimana pelaksanaannya dilakukan secara tertutup. Sehingga, publik tidak dapat mengikuti dinamika dari proses keputusan atau penetapan tersebut, dan kondisi ini kembali menegaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari ketiga aspek proses rekrutmen yang dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari dan Fadiyah. "Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota

- Legislatif Dpr Ri Tahun 2014-2019)." *Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip Uta'45 Jakarta* 4, No. 2 (2019): 1–19.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Anggota Dprd Kabupaten Majalengka Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2009." Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, (2018).
- Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited By Riyadh Dan Ryan Pradana Muhammad. Edisi Revi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2008).
- Direktorat Penyelenggara Pemilu. "Pemilihan Umum Tahun 1971." [Kepustakaan.Presiden.Go.Id](https://kepuustakaan.presiden.go.id), (2021).
- Ekowati, Yuli. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Transformative* 5, No. 16–36 (2019).
- Gaffar. *Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Ilhamsyah. "Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dpd Partai Solidaritas Indonesia (Psi) Kabupaten Wajo." Universitas Muhammadiyah Makassar, (2019).
- Junaidi & Marwan. "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Di Kabupaten Kapuas." *Jurnal Sociopolitico* 1, No. 2 (2019): 80–90.
- Mussolli. "Rekrutmen Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Pada Pemilihan Legislatif Di Dpc Pkb Kota Pontianak Tahun 2014." *Aspirasi* 4, No. 2 (2016): 5.
- Netherlands Institute For Multiparty Democracy Nidm. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Den Haag: The Netherlands Institute For Multiparty Democracy, (2006).
- Norris, Pippa. "*Recruitment*" Dalam *Richard S Katz & William Crotty Handbook Of Party Politics*. London: Sage, (2006).
- Prasojo. "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019." *Politika* 4, No. 2 (2019): 21–29.
- Purnawati. "22 Dari 50 Caleg Terpilih Dprd Majalengka Adalah Incumbent." [Pikiranrakyat.Com](https://pikiranrakyat.com), (2019).
- Purnawati, Laily. "Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kabupaten Tulungagung)" 4, No. 1 (2021): 33–42.
- Ramadhan. "Menuju Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 4

- (2019): 570–97. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.570-597>.
- Richard S Katz & William Crotty. *Handbook Of Party Politics*. London: Sage, (2006).
- Ridha, Muhammad. “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan.” *Cosmogov* 2, No. 1 (2017): 160. <https://doi.org/10.24198/Cosmogov.V2i1.11855>.
- Saputra. “Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (Dpc) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam),” (2012), 1–6.
- Suhendra. “Pola Rekrutmen Politik Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2009 (Studi Pada Dpd Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara).” Universitas Sumatera Utara, (2009).
- Todapa, Ziegel. “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.” *Ipdn*, (2017).
- Yohana. “Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai.” *Aspirasi*, (2020): 1–17.